

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang mewujudkan pertumbuhan produksi barang dan jasa suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah yang diciptakan oleh sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total di kenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor ekonomi. Cerminan keberhasilan tersebut salah satunya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbangkan 12,40% dengan tanaman perkebunan memberikan sumbangan PDB sebesar 735.907,4 milyar yang ditunjukkan pada Lampiran 1. (BPS, 2023:4&108).

Perdagangan komoditi produk perkebunan seperti lada, pala, cengkeh, rempah-rempah, kopi, kakao, karet dan kelapa sawit berkembang dengan pesat di Indonesia. Produk-produk pertanian tersebut merupakan produk utama dalam meningkatkan perekonomian Indonesia (Pahan, 2013:42). Untuk mempertahankan produk-produk komoditi perkebunan tersebut maka diperlukan strategi keunggulan dengan mempertahankan kualitas bahan baku yang berstandar industri. Keunggulan produk tersebut dapat menciptakan daya saing produk yang tinggi dengan memanfaatkan tenaga kerja, iklim tropis (sinar matahari dan curah hujan merata sepanjang tahun), ketersediaan lahan yang luas, serta ditambah dengan dukungan pemerintah dalam pendanaan investasi (Pahan, 2013:41).

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil pertanian yang potensial di Indonesia karena Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunai setelah Malaysia. Sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit di kuasai oleh Indonesia dan Malaysia (Pahan, 2013:41). Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang berasal dari Afrika Barat. Tanaman ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda tahun

1848. Awalnya, tanaman sawit dibudidayakan sebagai tanaman hias yang bertujuan untuk komersial baru dimulai tahun 1911. Perintis perkebunan kelapa sawit di Indonesia yaitu Adrien Hallet berasal dari Belgia (Pardamean, 2014:5).

Pada tahun 1911, perusahaan Jerman juga membuka usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia tepatnya Tanah itam Ulu. Langkah investor Belgia dan Jerman tersebut diikuti oleh investor asing lainnya termasuk Belanda dan Inggris. Tahun 1916 terdapat 19 (sembilan belas) perusahaan pekerbunan kelapa sawit di Indonesia dan pada tahun 1920 meningkat menjadi 34 perusahaan. Pabrik kelapa sawit (PKS) pertama di Indonesia dibangun di Sungai Liput pada tahun 1918 dan pada tahun 1922 di bangun di Tanah Itam Ulu (Paspi, 2017:2).

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan secara signifikan. Perkembangan kelapa sawit di Indonesia memiliki jenis perusahaan yaitu Perusahaan Besar Negara (PBN), Perusahaan Swasta dan Perkebunan Rakyat. Berdasarkan gabungan ketiga perusahaan tersebut terlihat bahwa total luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2018 berjumlah 14.325.350 hektar, tahun 2019 memiliki total 14.456.612, selanjutnya diiringi dengan tahun 2020 berjumlah 14.586.597 hektar, tahun 2021 berjumlah 14.621.693 hektar dan tahun 2022 berjumlah 14.338.556 hektar. Dari ketiga jenis perusahaan tersebut yang paling luas adalah perusahaan swasta. Tingginya luas perkebunan kelapa sawit swasta tersebut disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu penghasil komoditi produk perkebunan yang baik dalam meningkatkan perekonomian sehingga para investor nasional dan internasional tergiur berinvestasi perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan *Crode Palm Oil* (CPO) sebagai komoditi ekspor. Menurut BPS Indonesia (2022:5), perusahaan swasta termasuk perkebunan besar yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.

Berdasarkan data Badan Statistik Indonesia Tahun 2023 dijelaskan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia berdasarkan status perusahaannya dari tahun 2018-2022 paling luas terdapat pada perkebunan swasta setelah itu diikuti oleh perkebunan rakyat lalu perusahaan besar negara (Lampiran 2). Hal ini seiring dengan pendapat Ernah, *et al.*, (2021:93), bahwa di Indonesia mayoritas

perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh perkebunan swasta, diikuti oleh perkebunan rakyat dan negara. Namun berdasarkan provinsi di Indonesia jika dilihat terdapat adanya variasi pada luas perkebunan berdasarkan status. Dimana ada provinsi yang perkebunan swastanya terbesar tapi ada juga yang perkebunan rakyat atau perkebunan negaranya yang terbesar. Adapun luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan provinsi dan status perusahaan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Berdasarkan data badan statistik Indonesia tahun 2023 perihal luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan provinsi dan status perusahaan tahun 2022 (lampiran 3) dapat dijelaskan dari 26 provinsi di Indonesia, 16 provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit berdasarkan statusnya tertinggi adalah perkebunan besar swasta. 8 provinsi perkebunan kelapa sawit terbesar adalah perkebunan rakyat dan 2 provinsi perkebunan besar negaranya yang terbesar. Lampiran 3 juga menjelaskan bahwa luas perkebunan berdasarkan Provinsi menurut statusnya seperti Perusahaan Besar Negara (PBN) terdapat pada Provinsi Sumatera Utara paling luas yaitu 302.220 hektar sedangkan yang paling sedikit terdapat pada Provinsi Bengkulu seluas 830 hektar. Sedangkan pada status Perusahaan Besar Swasta (PBS) paling luas terdapat pada Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 1.808.538 hektar dan paling sedikit terdapat pada Provinsi Banten dengan luas 2.359 hektar. Perkebunan Rakyat (PR) paling luas terdapat pada Provinsi Riau dengan luas 1.762.164 hektar dan paling sedikit terdapat pada Provinsi Jawa Barat dengan luas 263 hektar.

Berdasarkan luas perkebunan kelapa sawit menurut provinsi yang telah dibahas di atas, maka penelitian ini terfokus kepada perkebunan kelapa sawit Provinsi Sumatera Barat karna Sumatera Barat termasuk 10 besar provinsi penghasil komoditi kelapa sawit. Sesuai Data dan Statistik Perkebunan (2022:v) perkembangan luas tanaman perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat periode 5 (lima) tahun seperti tahun 2018 mencapai sekitar 418.420 hektar, tahun 2019 mencapai 385.921 hektar terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020 sekitar 408.602, hektar tahun 2021 sekitar 416.891 hektar dan tahun 2022 sekitar 439.902 hektar. Sehingga perkebunan kelapa sawit

di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan Data dan Statistik Perkebunan (2022:v) dijelaskan bahwa perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah mencapai seluas 439.902 hektar. Luasnya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera tersebut menentukan jumlah produksi yang dihasilkan. Berdasarkan Lampiran 3, menjelaskan bahwa di Sumatera Barat terdapat Perkebunan Besar Negara (PBN) pada peringkat 10 (sepuluh) dari Provinsi lainnya yang ada Indonesia dengan luas lahan 7.828 hektar. Sedangkan Perusahaan Besar Swasta (PBS) peringkat 10 (sepuluh) dengan luas lahan 180.403 hektar. Selanjutnya perkebunan rakyat pada tahun 2022 berada diperingkat 9 (sembilan) dibandingkan perkebunan rakyat lainnya di Indonesia dengan luas 251.672 hektar. Menurut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (2019), Sumatera Barat pada tahun 2019 dikenal sebagai penghasil komoditas pertanian menjadikan bungkil kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor yang unggul senilai 10 ribu ton dengan tujuan Selandia Baru. Bungkil sawit adalah olahan inti kelapa sawit menjadi pakan ternak.

Data dan Statistik Perkebunan (2022:8), menjelaskan perkembangan produksi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 berkisar 1.269.926 Ton, tahun 2019 berkisar 1.269.176 Ton, tahun 2020 berkisar 1.298.653 Ton, tahun 2021 berkisar 1.354.198 Ton dan tahun 2022 berkisar 1.411.622 Ton.

Data di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat produksi kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 mencapai 1.411.622 Ton, jumlah produksi ini terlihat meningkat dari tahun 2018-2022. Data luas perkebunan kelapa sawit dan jumlah produksi yang dihasilkan di Provinsi Sumatera Barat ini dapat dilihat lebih spesifiknya berdasarkan tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Luas perkebunan kelapa sawit menurut kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 perihal Luas Perkebunan Kelapa Sawit

Rakyat Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 (Lampiran 4) dapat dijelaskan bahwa perkebunan kelapa sawit berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat paling luas terdapat pada Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah 126.934,00 hektar dan paling sedikit terdapat pada Kota Padang dengan luas 3,00 hektar. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas berdasarkan data-data mendukung tentang perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat maka penelitian ini terfokus kepada perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Agam, yang mana pada wilayah tersebut terdapat perkebunan kelapa sawit dengan nama PT AMP Plantation, perusahaan ini selain memiliki perkebunan kelapa sawit juga memiliki mesin pengolahan kelapa sawit dari Tandan Buah Segar (TBS) di olah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan sering juga disebut sebagai minyak mentah (Lampiran 5).

PT AMP Plantation semenjak berdirinya tentu memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar perusahaan. Menurut Angga, *et al.*, (2022:61), berdirinya perusahaan-perusahaan pada suatu daerah tentu akan berpengaruh secara makro terhadap perekonomian nasional serta memiliki dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi tersebut dapat berupa bertambahnya lapangan pekerjaan, menurunnya angka pengangguran, dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak ekonomi ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat (Angga, *et al.*, 2022:60)

Aspek ekonomi perkebunan kelapa sawit memiliki nilai yang signifikan seperti mampu meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. (Praselia, *et al.*, 2016:76). Aktivitas perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya mampu memberikan nilai tambah yang tinggi di sektor perekonomian, karena kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani jika dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Jumhur, 2023:333).

Dampak ekonomi dengan adanya PT AMP Plantation bagi masyarakat Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Agam berupa meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan peluang usaha. Dampak ekonomi ini merupakan rujukan dari beberapa penelitian terdahulu seperti (Siregar, *et al.*, 2016:1; Apriyanti, *et al.*, 2020:87; Angga, *et al.*, 2022:60;

Jumhur, 2023:330; Hidayah, *et al.*, 2020:63). Selain, membahas dampak positif yang diberikan perkebunan kelapa sawit secara ekonomi terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan nilai ekonomi tersebut seperti faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan sumber daya modal (Mirna & Sandy, 2017:74).

Dampak ekonomi karena perkebunan besar kelapa sawit tersebut dibahas secara terpisah oleh para peneliti, maka oleh sebab itu pada penelitian ini mencoba untuk menggabungkan beberapa dampak ekonomi tersebut sebagai dasar untuk penyempurnaan dampak ekonomi sebagai dasar memenuhi kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit PT AMP Plantation. Penelitian ini menarik untuk dibahas karena dapat mengetahui dampak apa saja yang dihasilkan perkebunan besar kelapa sawit seperti PT AMP Plantation bagi masyarakat di sekitar perusahaan dan selain itu juga dapat mengetahui faktor mempengaruhi pembangunan ekonomi. Penelitian sebelumnya belum membahas tentang faktor mempengaruhi pembangunan ekonomi yang merupakan dampak dari perkebunan kelapa sawit seperti Prasetia, *et al.*, 2016; Siregar, *et al.*, 2016; Aggara, *et al.*, 2022; Apriyanti, *et al.*, 2020; Siradjuddin, 2015; Lisa, *et al.*, 2022; Hidayah, *et al.*, 2020; Syafitri; 2023; Jumhur, 2023; Lisdayani & Ameliyan, 2021). Analisa data yang terdapat pada penelitian sebelumnya dilakukan secara kuantitatif dan ada juga yang kualitatif. Sedangkan pada penelitian ini analisa data dilakukan dengan kualitatif melalui proses wawancara. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini merupakan suatu kebaruan pada penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Perkebunan kelapa sawit dalam menjalankan operasionalnya perlu mempertimbangkan beberapa hal yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungannya. Dampak positif ini dapat bernilai tambah bagi orang lain sebelum dan sesudah berdirinya perkebunan kelapa sawit tersebut. Sedangkan dampak negatifnya merupakan dampak buruk yang dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar perusahaan.

Perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera Barat salah satunya adalah PT AMP Plantation yang merupakan salah satu perusahaan dari Wilmar

International Limed yang produk utamanya adalah perkebunan kelapa sawit. Status Pemodalan perusahaan bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan tenaga kerjanya berasal dari tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki tenaga kerja bulanan, karyawan harian dan borongan. PT AMP Plantation diresmikan pada tahun 1994 dengan alamat kantor pusat di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Pada tahun 2006, saat itu perusahaan memiliki kantor perwakilan di Jl. Prof Dr. Hamka No. 59 Tabing, Kota Padang.

PT AMP Plantation beralamat di Nagari Salareh Aia Barat, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam Sumatera Barat dengan luas pabrik : 20 hektar. Luas kebun : 7.925,42 hektar. Luas perkebunan inti 7.926 hektar dan luas perkebunan plasma : 5.148 hektar. PT AMP Plantation memiliki produk olahan, *Crude Palm Oil (CPO)*, inti sawit (palm kernel). PT AMP Plantation membangun sistem kerja sama dalam bentuk bermitra berupa Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang dilakukan dengan masyarakat disekeliling perusahaan yang terhubung kedalam Koperasi Unit Desa (KUD).

Tabel 1 Hasil Produksi PT AMP Plantation Agam tahun 2023

Bulan	TBS diolah (Ton)	<i>Crude Palm Oil (CPO)</i> (Ton)	<i>Palm Kernel (PK)</i> (Ton)
Januari	37.689.303	6.775.000	1.725.000
Februari	34.287.069	6.150.000	1.400.000
Maret	37.403.135	6.650.000	1.675.000
April	30.184.500	5.225.000	1.350.000
Mei	41.775.943	8.250.000	1.725.000
Juni	39.010.596	6.100.000	1.750.000
Juli	41.090.589	6.000.000	1.750.000
Agustus	39.696.943	8.150.000	1.775.000
September	37.618.698	6.150.000	1.625.000
Oktober	34.087.998	5.575.000	1.450.000
November	31.409.832	6.625.000	1.250.000
Desember	28.067.427	5.025.000	1.225.000

Sumber: PT AMP Plantation Agam tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1, di atas dapat dijelaskan bahwa Produksi PT AMP Plantation Agam memiliki tiga jenis produksi TBS (Tandan Buah Segar). Rata-

rata produksi produk pada tahun 2023 yaitu TBS (Tandan Buah Segar) sebesar 36.026.836 ton. *Crude Palm Oil (CPO)* sebesar 6.389.583 ton dan *Palm Kernel (PK)* sebesar 1.558.333 ton. Berdirinya PT AMP Plantation tersebut tentunya dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar khususnya masyarakat di Nagari Salareh Aia Barat Kecamatan Palembang Agam.

Saat ini masyarakat dihadapkan dengan berbagai dampak ekonomi seperti harga tandan buah segar (TBS) milik masyarakat tidak stabil bahkan sering terjadi penurunan yang signifikan pada bulan Juli 2022 sebesar Rp. 500/kg sehingga masyarakat lebih memilih tidak panen TBS yang disebabkan karena tangki penyimpanan CPO di perusahaan itu sudah penuh dan impor CPO terhenti (Yusrizal, 2022).

Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi bagi kehidupan masyarakat di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Agam salah satunya adalah minimnya pengetahuan tentang perkebunan kelapa sawit maka oleh sebab itu Bupati Agam lebih menekankan kepada masyarakat untuk memahami pengelolaan perkebunan kelapa sawit jadi hal utama, dalam mendorong maksimalnya produksi mulai dari jenis bibit akan ditanam, cara dan waktu pemupukan serta kapan harus peremajaan karena berpengaruh pada harga TBS. maka oleh sebab itu Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Agam, agar bisa melakukan pembinaan bagi masyarakat pekebun. Kontribusi perusahaan dalam pembinaan ini sangat dibutuhkan, yang nanti berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat (Agustino, 2022). Penelitian ini terfokus kepada dampak ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pengukurannya dapat dilakukan antara sebelum dan sesudah adanya perkebunan kelapa sawit PT AMP Plantation.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana dampak ekonomi perkebunan besar kelapa sawit terhadap kehidupan masyarakat di Nagari Salareh Aia Barat Kecamatan Palembang Agam studi kasus PT AMP Plantation?

2. Apakah faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi masyarakat di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Agam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dampak ekonomi perkebunan besar kelapa sawit terhadap kehidupan masyarakat di Nagari Salareh Aia Barat Kecamatan Palembayan Agam studi kasus PT AMP Plantation.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi masyarakat di Nagari Salareh Aia Barat Kecamatan Palembayan Agam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini hendaknya dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan, seperti:

1. Bagi peneliti

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini, menambah pengetahuan penulis mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit dalam mamajukan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit.

2. Bagi PT AMP Plantation di Kabupaten Agam

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini maka pihak perusahaan dapat mengetahui dampak secara ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar perusahaan apakah dampak tersebut dapat berbentuk positif maupun bentuk negatif.

3. Bagi pemerintah

Dengan pelaksanaan penelitian ini, maka pemerintah dapat mengetahui keadaan perekonomian masyarakat lebih jelas karena dampak dari perkebunan kelapa sawit, sehingga pemerintah dapat lebih tegas dalam menerapkan sanksi-sanksi jika perusahaan menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.

